

**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BASIS  
AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH,  
DAN KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN GRESIK**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**NOVITA**

**NIM: G72219059**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAAN

Saya, Novita, G72219059, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 12 Juli 2023




Novita  
NIM. G72219059

Surabaya, 26 Juni 2023

**Sakripsi telah selesai dan siap diuji**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a vertical line and a horizontal line, with a small flourish at the end.

Noor Wahyudi, M.Kom

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Oleh

Novita


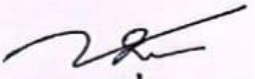
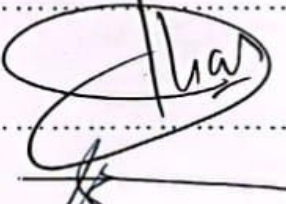

NIM: G72219059

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada  
Tanggal 12 Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk  
diterima

#### Susunan Dewan Penguji:

1. Noor Wahyudi, M.Kom.  
NIP.198403232014031002
2. Nufaisah, S.Sos.I, M.Ak.  
NIP. 198907312019032014
3. Ashari LintangYudhanti, M.Ak.  
NIP.199411082019032021
4. Debby Nindya Istiandari, M.E.  
NIP.199512142022032002

Tanda Tangan:

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Surabaya, 12 Juli 2023



Dr. Sunardi Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I

197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Novita  
NIM : G72219059  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Akuntansi  
E-mail address : novitalmg0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

Dan Kesiapan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Gresik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Oktober 2023

Penulis

( Novita )  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Kualitas laporan keuangan merupakan salah satu topik yang menarik dan relevan untuk diteliti karena laporan keuangan menjadi bukti kinerja pemerintah yang seyogyanya mampu memberikan transparansi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kesiapan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode positivistik karena berdasarkan pada filsafat positivism. Metode ini dinamakan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 89, yang diperoleh melalui metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer yang diolah menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS (*Statistical Program for Social Sciens*) versi 27.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kesipan sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kesiapan sumber daya manusia berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini mengkonfirmasi teori agensi yang dibutuhkan oleh setiap instansi untuk kepentingan bersama pihak eksternal.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sumber Daya Manusia

## ABSTRACT

*The quality of financial report is an interesting and relevant topic to study because financial reports are proof of government performance which should be able to provide transparency to the public. This study aims to examine the effect of applying accrual-based government accounting standards, the government's internal control system, and the readiness of human resources on the quality of financial reports.*

*The research uses quantitative research methods. The quantitative research methods is defined as a positivistic method because it is based on the philosophy of positivism. This method is called the quantitative method because the research data is in the form of numbers and the analysis uses statistics. The number of samples in this study were 89, which were obtained through a purposive sampling method. This study used primary data which were processed using multiple linear regression analysis techniques assisted by SPSS (Statistical Program for Social Sciens) version 27.*

*The results of this study indicate that the application of accrual-based government accounting standards and the government's internal control system have a significant effect on the quality of financial report , while the readiness of human resourch has no significant effect on the quality of financial reports. While the application of accrual-based government accounting standards, the government's internal control system, and the readiness of human resources have a simultaneous effect on the quality of financial reports. In addition, this study confirms the agency theory that is needed by each agency for the mutual benefit of external parties.*

*Key words: Accrual-Based Government Accounting Standards, Government Internal Control System, Human Resources*

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

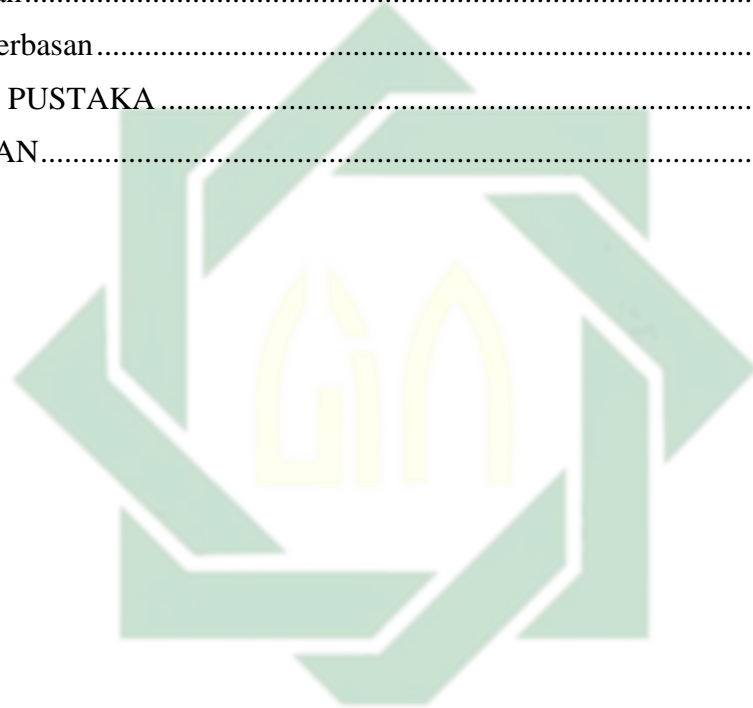
## DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Kajian Teori.....	8
2.1.1 Teori Agensi ( <i>Agency Theory</i> ) .....	8
2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua.....	9
2.1.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	11
2.1.4 Sumber Daya Manusia.....	19
2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan .....	21
2.2 Penelitian Terdahulu .....	24
2.3 Pengembangan Hipotesis .....	31
2.3.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	31
2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	33
2.3.3 Pengaruh Kesiapan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	35



2.3.4 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kesiapan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	37
2.4 Kerangka Konseptual .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian .....	40
3.3 Populasi Dan Sampel .....	40
3.3.1 Populasi .....	40
3.3.2 Sampel .....	42
3.4 Variabel Penelitian .....	43
3.4.1 Variabel <i>Independent</i> .....	44
3.4.2 Variabel <i>Dependent</i> .....	45
3.5 Definisi Operasional.....	45
3.6 Jenis Dan Sumber Data .....	47
3.7 Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.8 Teknik Analisis Data.....	48
3.8.1 Uji Kualitas Data .....	49
3.8.2 Uji Asumsi Klasik .....	51
3.8.3 Pengujian Hipotesis .....	53
<b>BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	56
4.1.1 Lokasi Objek Penelitian.....	56
4.1.2 Karakteristik Statistik Deskriptif Responden .....	56
4.2 Analisis Data .....	59
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	59
4.2.2 Uji Kualitas Data .....	60
4.2.3 Uji Asumsi Klasik .....	63
4.2.4 Pengujian Hipotesis .....	67
4.3 Pembahasan.....	72
4.3.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	72
4.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	74

4.3.3 Pengaruh Kesiapan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	75
4.3.4 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kesiapan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80
5.3 Keterbasan.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN.....	84



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 3. 1 Populasi Penelitian.....	41
Tabel 3. 2 Sampel Penelitian .....	43
Tabel 3. 3 Definisi Operasional .....	46
Tabel 3. 4 Skala Likert.....	47
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	59
Tabel 4. 2 Rekap Hasil Uji Validitas .....	60
Tabel 4. 3 Rekap Hasil Uji Reliabilitas .....	62
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas .....	63
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinieritas .....	65
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	66
Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	67
Tabel 4. 8 Hasil Uji T (Parsial).....	69
Tabel 4. 9 Hasil Uji F (Simultan).....	71
Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinan .....	71



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	39
Gambar 4. 1 Data Berdasarkan Jabatan .....	57
Gambar 4. 2 Data Berdasarkan Jenis Kelamin .....	58
Gambar 4. 3 Hasil Uji Normalitas .....	64



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner.....	84
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Gresik .....	90
Lampiran 3 Tabel Uji.....	92



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia sektor publik berkembang mengikuti laju dan aturan dari pemerintah yang sudah ditetapkan. Pemerintahan kabupaten Gresik merupakan instansi pemerintahan yang memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan. Pemerintahan juga bergerak sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat baik pelayanan sosial, kesehatan, keamanan, pelayanan umum lainnya dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dengan terealisasinya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Negara. Tidak hanya di pemerintahan pusat saja, namun pemerintah daerah juga diharapkan dapat mewujudkan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kinerja instansi yang baik dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh instansi dalam suatu periode tertentu. Penilaian kinerja suatu instansi pemerintah dilakukan untuk memotivasi pegawai dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang ditetapkan agar tercapai tujuan instansi pemerintah. Kinerja instansi pemerintah adalah salah satu indikator yang penting, tidak hanya bagi instansi pemerintahan saja tetapi juga bagi investor (atasan dan masyarakat). Kinerja menjadi patokan keberhasilan instansi pemerintahan untuk mencapai hasil yang baik dari apa yang sudah dicita-citakan instansi pemerintahan. Kinerja juga menunjukkan kemampuan

manajemen instansi pemerintah dalam mengelola anggarannya. Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai kegiatan dalam rantai nilai yang ada di instansi pemerintahan.

Dalam sebuah instansi diperlukan laporan keuangan sebagai suatu alat yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Ariyanto, 2020). Laporan keuangan digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu laporan keuangan memiliki peranan lain yakni menyediakan informasi yang relevan serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pembuatan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Kualitas laporan keuangan suatu instansi dapat ditinjau dari predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Menurut BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh auditor eksternal, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Dimana dalam website resmi pemerintahan Kabupaten Gresik terdapat pernyataan Kepala BPK yang menyampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberikan opini, dimana opini tersebut merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaeen penyajian laporan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Basis Akrual, Sistem Pengendalian Internal, dan Kesiapan Sumber Daya Manusia.

Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagai pengganti PP Nomor 24 tahun 2005 (Ayu & Kusumawati, 2020). SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan hukum dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dengan diterapkannya SAP, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional.

Dengan bergantinya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) basis kas menjadi basis akrual ditemukan perubahan-perubahan maupun penyesuaian dalam penerapan SAP basis akrual pada laporan keuangan daerah. Dalam permendagri Nomor 64 Pasal 1 ayat 10 bahwa basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar (Hastutik & Riduwan, 2018). Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan atau aset yang lebih transparan dan akuntabel.



Laporan keuangan pemerintah daerah yang baik juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki instansi pemerintah daerah. Pengendalian internal yang lemah dapat menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan atau ketidakakuratan proses akuntansi, sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. Menurut Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2020).

Selain pengendalian internal, dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas juga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. Kompetensi sumber daya manusia dapat menjalankan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian atau sikap (Ayu & Kusumawati, 2020). Kompetensi sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan suatu entitas (Hastutik & Riduwan, 2018). Kapasitas kompetensi sumber daya manusia harus dilihat sebagai kemampuan mencapai kinerja untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome) (Ferdian, 2021).

Scott menyatakan bahwa perusahaan memiliki banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak

pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya (Baridwan, 2000). Pemerintahan memiliki hubungan keagenan yaitu hubungan antara pemerintah dan pengguna informasi keuangan pemerintah. Prinsip utama teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) dengan pihak yang menerima wewenang (agen) dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*" (Rahayu, 2020). Pemerintah merupakan agen yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang berkualitas kepada masyarakat.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada instansi pemerintah daerah kabupaten Gresik, dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa pegawai pemerintah yang kurang memahami mengenai penggunaan standar penyusunan laporan keuangan basis akrual atau basis kas, yang dibuktikan dengan pegawai tidak dapat membedakan terkait penggunaan basis pada penyusunan laporan. Karena laporan keuangan menjadi bukti kinerja pemerintah yang seyogyanya mampu memberikan transparansi kepada masyarakat. Berdasarkan pengamatan pra penelitian yang dilakukan, penulis menemukan permasalahan dimana terdapat adanya karyawan yang belum paham dengan baik terkait penggunaan standar penyusunan laporan keuangan. Selain itu Kabupaten Gresik telah menerima predikat WTP sebanyak 7 kali berturut-turut. Oleh karena itu peneliti menggunakan Kabupaten Gresik sebagai objek penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut selanjutnya dilakukan penelitian tentang pengaruh standar akuntansi pemerintah basis akrual, sistem pengendalian internal, dan kesiapan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gresik.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah standar akuntansi pemerintah basis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah kesiapan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual, sistem pengendalian intern pemerintah dan kesiapan sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan?

## 1.3 Tujuan

1. Untuk menguji pengaruh standar akuntansi pemerintah basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menguji penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem pengendalian internal, dan kesiapan sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

## **1.4 Manfaat**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh standar akuntansi pemerintah (SAP) basis akrual, sistem pengendalian internal pada pemerintah kabupaten gresik. Selain itu juga bertujuan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1.4.2.1 Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual dan sistem pengendalian internal bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

#### **1.4.2.2 Bagi Instansi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen agar penyajian laporan keuangan lebih akurat sekaligus sebagai bahan evaluasi terkait penerapan SAP basis akrual dan sistem pengendalian internal pada instansi terkait.

#### **1.4.2.3 Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada serta dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Pemerintah yang demokrasi memiliki hubungan keagenan yaitu hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah. Akuntansi publik menurut Mardiasmo merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Hastutik & Riduwan, 2018). Dalam teori agensi terdapat asimetri informasi, yaitu pihak agen mengetahui lebih banyak informasi internal dalam suatu perusahaan dibandingkan dengan pihak *principal*. Asimetri informasi terjadi di semua organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Pada sektor publik, pemerintah sebagai perantara informasi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat sebagai *principal* (Wurangian et al., 2021).

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu pertanggungjawaban atas pengolahan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dimana akuntabilitas ini merujuk pada kemampuan pihak yang berkedudukan dalam posisi non-kepemimpinan untuk menuntut akuntabilitas kepada pemimpin, yang artinya status agen lebih tinggi dari

prinsipal. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal), yaitu hubungan akuntabilitas antara agen dan principal dimana keduanya berkedudukan sejajar atau dapat dikatakan sebagai fungsi dari *check and balance* yang berada dalam perusahaan.

Prinsip utama teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (agen) dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*" (Rahayu, 2020). Pemerintah merupakan agen yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang berkualitas kepada masyarakat. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat menjadi salah satu tolok ukur dari pertanggungjawaban pemerintah selaku agen kepada masyarakat selaku prinsipal.

### **2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua**

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010, terkait SAP pada pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 bahwa Standar Akuntansi Pemerintah atau disebut SAP, yaitu suatu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam membuat dan melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan laporan keuangan pemerintah Indonesia. Standar akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan

*stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel (Ariyanto, 2020).

Menurut PP 71 Tahun 2010, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau dibayar (Dini Lestari dan Sri Rahayu, 2020). Dalam akuntansi akrual, waktu posting atau pencatatan sesuai dengan waktu terjadinya arus sumber daya (Ayu & Kusumawati, 2020). Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual diarahkan untuk memberi manfaat lebih baik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), para pengguna, maupun pemeriksa keuangan pemerintah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, basis akrual dapat mempresentasikan reliabilitas, relevansi, dan komparabilitas informasi yang diungkapkan dalam laporan, sehingga dapat dipastikan bahwa informasi telah disajikan secara jujur. Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual menyajikan informasi yang dapat diukur dengan indikator yang dijelaskan menurut permendagri No. 64 Tahun 2013 yaitu (Dini Lestari dan Sri Rahayu, 2020):

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran
3. Laporan Posisi Keuangan
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Operasional

## 7. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Salah satu hasil studi yang dilakukan *IFAC Public Sector Committee* (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Ayu & Kusumawati, 2020). Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi berbasis akrual juga dapat memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

### 2.1.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Ikriyati & Aprilia, 2019). Menurut Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan



efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2020).

Pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Proses pengendalian internal yang baik dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi organisasi akan menimbulkan semangat organisasi untuk terus melakukan upaya dalam menjaga kualitas laporan keuangan organisasi.

Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses, yang mencakup sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian internal adalah cara untuk mengarahkan, memantau, dan mengukur sumber daya organisasi dan memainkan peran penting dalam pencegahan dan deteksi penipuan (*fraud*) (Yaqin & Jatmiko, 2018). *Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission (COSO)* memperkenalkan adanya lima komponen Pengendalian Internal yang meliputi Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assesment*), Aktivitas Pengendalian (*Control Procedure*), Pemantauan (*Monitoring*), serta Informasi dan Komunikasi (*Information And Communication*) (Gasperz, 2019).

### 2.1.3.1 Lingkungan Pengendalian (*Environment Control*)

Merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur, dan pemilik suatu entitas tentang pengendalian internal dan kepentingan bagi entitas tersebut (Jaunanda et al., 2020). Pengendalian lingkungan internal yaitu menentukan bentuk organisasi, menciptakan efek *awereness* pada SDM-nya. Integritas, nilai etik, kompetensi, komitmen, direksi, audit, dan human resources ialah suatu faktor-faktor yang memberikan pengaruh pada pengendalian lingkungan.

Sedangkan menurut Arens, Elder, dan Beasley (2015:346) beberapa faktor yang mempengaruhi pengendalian lingkungan diantaranya (Iswahyudi & Dwi Prastowo Darminto, 2019):

1. Integritas dan nilai etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Partisipasi dewan direksi dan komisaris atau komite audit.
4. Filosofi dan gaya operasi manajemen.
5. Struktur organisasi.
6. Kebijakan perihal Sumber Daya Manusia.

### 2.1.3.2 Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko (*risk assessment*) adalah menganalisis atau mengidentifikasi atas risiko yang bernilai relevan untuk mencapai suatu tujuan, metode untuk menetapkan tata cara mengelola risiko (Iswahyudi & Dwi Prastowo Darminto, 2019). Dalam pengertian lain, penilaian risiko adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko

yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan perusahaan secara umum (Jaunanda et al., 2020).

Pelaksanaan penilaian risiko dalam laporan keuangan adalah standarisasi analisis, identifikasi, pengorganisasian, dan manajemen risiko terkait dengan pelaporan keuangan dimulai dari kegiatan pencatatan, kegiatan proses, kegiatan ikhtisar serta laporan data financial. Berdasarkan rumusan *COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission ) Risk Assesment* mencakup proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi menilai risiko terkait pencapaian tujuan (Iswahyudi & Dwi Prastowo Darminto, 2019).

### **2.1.3.3 Aktivitas Pengendalian (*Activity Control*)**

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil untuk menangani risiko yang diidentifikasi oleh perusahaan (Jaunanda et al., 2020). Aktivitas pengendalian mempunyai tingkatan-tingkatan implementasi dalam penerapan di tingkat fungsi maupun organisasi. Berikut adalah beberapa kategori aktivitas pengendalian (Iswahyudi & Dwi Prastowo Darminto, 2019):

1. Kontrol olah data informasi (pemrosesan)
  - a. *Application control*
  - b. Sistem otorisasi akurat
  - c. Aktualisasi pencatatan dan dokumentasi
  - d. Independensi pemeriksaan
  - e. Pengendalian umum

2. Pemisahan tugas
  - a. Pengendalian fisik
  - b. Telaah kinerja

#### **2.1.3.4 Informasi Dan Komunikasi (*Information and Communication*)**

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka (Iswahyudi & Dwi Prastowo Darminto, 2019). Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi yang berisi metode mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, klasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Komunikasi meliputi penyediaan deskripsi tugas individu dan tanggungjawab berkaitan dengan struktur pengendalian internal dalam pelaporan keuangan.

Auditor harus memperoleh pengetahuan yang memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahani:

1. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan.
2. Bagaimana transaksi tersebut dimulai.
3. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi.

4. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi.

Kualitas informasi yang dihasilkan sistem informasi akuntansi berdampak pada kemampuan manajemen untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan sehubungan dengan operasi perusahaan dan untuk menyiapkan laporan keuangan yang andal (Jaunanda et al., 2020).

#### **2.1.3.5 Pemantauan (*Monitoring*)**

Yaitu proses dimana kualitas desain dan operasi pengendalian internal dapat dinilai (Jaunanda et al., 2020). Dalam pemahaman lain, monitoring merupakan penilaian terhadap mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik untuk memastikan pengendalian internal telah berjalan dan telah dilakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai kondisi yang ada (Rumamby et al., 2021). Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

Berdasarkan AICPA karakteristik sistem pengendalian internal yang baik adalah sebagai berikut (Iswahyudi & Dwi Prastowo Darminto, 2019):

1. Tujuan pengendalian akuntansi tergantung pada kompetensi dan integritas personal, independensi fungsi yang diberikan, dan pemahaman mereka tentang prosedur yang telah ditentukan.

2. Pemisahan fungsi yang cukup. Adanya pemisahan fungsi yang jelas atas fungsi yang berlainan untuk tujuan pengendalian internal. Pemisahan fungsi ini adalah dengan menempatkan orang yang berbeda dalam suatu posisi.
3. Transaksi dibuat sesuai dengan bukti yang independen yang membutuhkan otorisasi, dimana otorisasi diberikan oleh orang yang berwenang dan transaksi sesuai dengan masa otorisasi.
4. Transaksi dicatat dalam jumlah dan periode akuntansi pada saat transaksi terjadi dan diklasifikasikan dalam akun yang tepat.
5. Perolehan aset harus dibatasi dengan otorisasi seseorang.
6. Aset yang ada harus dibandingkan dengan catatan akuntansinya.

Sistem pengendalian internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 mengarahkan pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya SPIP. Empat tujuan tersebut adalah sebagai berikut (Wibowo, 2020):

1. Kegiatan yang efektif dan efisien

Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif apabila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan instansi pemerintah dapat dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima) dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Istilah efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil.

## 2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau dapat dipercaya, dengan pengertian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

## 3. Pengamanan aset Negara

Aset Negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan Negara. Pengamanan aset Negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian pada aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Upaya pengamanan aset ini antara lain dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.

## 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindak pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan aparat maupun masyarakat.

#### 2.1.4 Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sumber Daya Manusia merupakan faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. SDM merupakan faktor yang sangat penting, dan terkait erat dengan organisasi, institusi dan perusahaan. Pada dasarnya Sumber Daya Manusia adalah individu produktif yang bekerja dalam sebuah organisasi atau institusi sebagai pelaku, pemikir dan perencana dan bertindak sebagai aset, oleh karena itu bakat mereka dikelola, dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi (Arza et al., 2021).

Sumber daya manusia merupakan *human capital* didalam suatu organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* adalah sumber inovasi dan gagasan atau ide. Karyawan yang dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi (Fathia et al., 2020). Kompetensi sumber daya manusia adalah



kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Ayu & Kusumawati, 2020).

Menurut Hutapea dan Thoha Dalam Puji Hastutik dan Akhmad Ridwan (2018) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan dan perilaku individu. Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan bidang yang digelutinya. Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan atau instansi kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal. Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan organisasi (Hastutik & Riduwan, 2018). Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat mendasari seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya serta memiliki peran yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Sumber daya manusia mencakup tiga aspek diantaranya adalah aspek pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP. Semakin tinggi ketiga aspek ini dimiliki oleh SDM, maka semakin tinggi kompetensi SDM tersebut. Ketersediaan SDM yang

kompeten akan mendukung penerapan SAP basis akrual dan sistem akuntansi keuangan (Binawati & Susliyanti, 2020).

### **2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan kinerja perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pemimpin perusahaan atas pengolahan perusahaan yang dipercaya kepadanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap perusahaan, yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditor (bank atau lembaga keuangan), maupun pihak yang berkepentingan lainnya. Dalam kamus akuntansi laporan keuangan merupakan laporan yang dirancang untuk membuat keputusan baik didalam maupun diluar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan tahunan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Rofiyanti (2011) dalam penelitian Rahayu (2020) menyebutkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi (Rahayu, 2020). Oleh karena itu, dibutuhkan yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Dari beberapa pengertian laporan keuangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kriteria keuangan suatu entitas. Laporan keuangan

juga menunjukkan tanggungjawab manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Karakteristik kualitas laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang perlu diterapkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam SAP peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan ada 4, yaitu (Ferdian, 2021):

#### **2.1.5.1 Relevan**

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang terdapat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

#### **2.1.5.2 Andal**

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan pengertian dan kesalahan material, menyajikan semua fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

### **2.1.5.3 Dapat Dibandingkan**

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dapat dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

### **2.1.5.4 Dapat Dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Keempat karakteristik diatas merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan.

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas keuangan Negara terdiri dari 4 pilar yaitu: efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai ke empat pilar tersebut, maka diperlukan adanya langkah-langkah yaitu dengan melaksanakan 5 pilar Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (Wibowo, 2020). Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan menggunakan standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum (Hastutik & Riduwan, 2018).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis sebagai bahan pemikiran dan referensi bagi penulis. Berikut tabel yang menjelaskan penelitian terdahulu:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Judul	“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem”. (Mahartini et al., 2021)
	Research	2021
	Metode	Kuantitatif
	Populasi	Seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) se Kabupaten Karangasem yang berjumlah 1292.
	Perbedaan	Variabel penelitian berbeda yaitu sistem informasi akuntansi
Persamaan	1. Metode pengumpulan data sama yaitu dengan menggunakan kuisioner	

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
		1) Teknik analisis data sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda
	Hasil	<p><b>Secara Parsial:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.</li> <li>2) Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.</li> <li>3) Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</li> </ol> <p><b>Secara Simultan:</b></p> <p>Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten karangasem</p>
No.	Judul	<p>“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018”.</p> <p>(Ariyanto, 2020)</p>
2	Research	2020
	Metode	Kuantitatif
	Populasi	Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Pelalawan.
	Perbedaan	Variabel yang digunakan berbeda yaitu sistem akuntansi keuangan daerah
	Persamaan	<p>1) Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teknik analisis data yang digunakan sama yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda</li> </ol>
	Hasil	<p><b>Secara Parsial:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</li> <li>2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</li> </ol> <p><b>Secara Simultan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pelalawan</li> </ol>
	Judul	“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
		Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dusun Di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bango)". (Ferdian, 2021)
3	Research	2021
	Metode	Kuantitatif
	Populasi	Perangkat dusun yang terdapat pada 17 dusun dalam wilayah kecamatan Pelepat Ilir.
	Perbedaan	Variabel yang digunakan berbeda yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan sistem keuangan daerah
	Persamaan	1. Metode pengumpulan data yang digunakan sama yaitu menggunakan kuisisioner 1. Teknik analisis yang digunakan sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda
	Hasil	<b>Secara Parsial:</b> 1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 2. Aplikasi sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 4. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah <b>Secra Simultan:</b> 2. Implementasi pemanfaatan teknologi informasi, aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dusun dalam wilayah kecamatan Pelepat Ilir.
	Judul	"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". (Hastutik & Riduwan, 2018)
4	Research	2018
	Metode	Kuantitatif
	Populasi	19 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
	Perbedaan	Variabel yang digunakan berbeda yaitu pengendalian internal tidak terdapat di penelitian ini.
	Persamaan	1. Metode pengumpulan data yang digunakan sama dengan menggunakan metode kuisisioner 1. Teknik analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
	Hasil	<p><b>Secara Parsial:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah</li> <li>2. Akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah</li> </ol> <p><b>Secara Simultan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kompetensi sumber daya manusia dan akuntansi basis akrual berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.</li> </ol>
	Judul	<p>“Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapin)”. (Wibowo, 2020)</p>
5	Research	2020
	Metode	Kualitatif
	Populasi	Seluruh pegawai bagian keuangan di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten tapin sebanyak 40 orang.
	Perbedaan	Variabel yang digunakan berbeda yaitu pemanfaatan teknologi informasi
	Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode pengumpulan data sama yaitu menggunakan kuisioner</li> <li>1. Teknik analisis data sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda</li> </ol>
5	Hasil	<p><b>Secara Parsial:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Tapin</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Tapin</li> <li>3. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Tapin</li> </ol> <p><b>Secara Simultan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh</li> </ol>



No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
		signifikan secara simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Tapin.
	Judul	“Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Dimoderasi Dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaL Dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah”. (Binawati & Susliyanti, 2020)
6	Research	2020
	Metode	Kualitatif
	Populasi	6 satuan kerja (satker) dan 30 PPK
	Perbedaan	Variabel yang digunakan berbeda yaitu kualitas teknologi informasi
	Persamaan	1. Metode pengumpulan data yang digunakan sam yaitu menggunakan kuisioner
	Hasil	<p><b>Secara Parsial:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan SAP basis akrual</li> <li>2. Kualitas teknologi informasi berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi keuangan</li> <li>3. Sistem akuntansi keuangan pemerintah berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah</li> </ol> <p><b>Secara Simultan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi dengan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual dan sistem akuntansi keuangan pemerintah.</li> </ol>
	Judul	“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar)”. (Ayu & Kusumawati, 2020)
7	Research	2020
	Metode	Kualitatif
	Populasi	Seluruh pegawai di organisasi perangkat daerah kabupaten gianyar yang berjumlah 6.174 orang.

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
	Perbedaan	Subjek yang digunakan berbeda yaitu perangkat daerah kabupaten Gianyar
	Persamaan	1. Variabel yang digunakan sama 2. Teknik analisis data sama-sama menggunakan regresi linier berganda 1. Metode pengumpulan data sama yaitu menggunakan kuisioner
	Hasil	<b>Secara Parsial:</b> 1. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 3. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan <b>Secara Simultan:</b> 3. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gianyar.
	Judul	“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Dinas Perikanan Kabupaten Subang)”. (Rahayu, 2020)
	Research	2020
8	Metode	Kualitatif
	Populasi	Seluruh pegawai di dinas perikanan Kabupaten Subang
	Perbedaan	1. Variabel yang digunakan berbeda dimana tidak terdapat variabel kompetensi sumber daya manusia Teknik analisis data yang digunakan hanya menggunakan analisis regresi linier berganda.
	Persamaan	1. Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan kuisioner 2. Teknik analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda
Hasil	<b>Secara Parsial:</b> 1. Penerapan standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan	

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
		<p><b>Secara Simultan:</b></p> <p>2. Penerapan standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinas perikanan Kabupaten Subang</p>
	Judul	<p>“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hilir)”. (Fathia et al., 2020)</p>
9	Research	2020
	Metode	Kualitatif
	Populasi	25 OPD berupa dinas dan badan di Kabupaten Rokan Hilir.
	Perbedaan	1. Variabel yang digunakan berbeda yaitu pemanfaatan teknologi informasi Variabel <i>dependen</i> yang digunakan yaitu kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai <i>variable moderating</i>
	Persamaan	1. Metode pengumpulan data sama yaitu dengan menggunakan kuisioner 2. Teknik analisis data sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda.
	Hasil	<p><b>Secara Parsial:</b></p> <p>1. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah 2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah 3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah</p> <p><b>Secara Simultan:</b></p> <p>2. Sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai <i>variable moderating</i>.</p>
	Judul	<p>“Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan</p>

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
		Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang". (Supraja, 2019)
10	Research	2019
	Metode	Kuantitatif
	Populasi	Pegawai yang terlibat dalam bagian akuntansi pada OPD Kabupaten Deli Serdang sebanyak 27 kantor.
	Perbedaan	Variabel yang digunakan berbeda yaitu efektivitas fungsi pengawasan dan kinerja keuangan pemerintah.
	Persamaan	1. Teknik pengumpulan data yang digunakan sama yaitu dengan menggunakan kuisisioner 1. Teknik analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda
	Hasil	<b>Secara Parsial:</b> 1. Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah 2. Efektifitas fungsi pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah <b>Secara Simultan:</b> 2. Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan efektivitas fungsi pengawasan berpengaruh secara simultan dan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten deli serdang.

### 2.3 Pengembangan Hipotesis

#### 2.3.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual

##### Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi akrual, waktu pencatatan sesuai dengan waktu ketika aliran sumber daya terjadi. Temuan studi yang dilakukan oleh *Public Sector Committee IFAC* (2002) menunjukkan bahwa pelaporan akrual berguna

dalam menilai kinerja pemerintahan dalam kaitannya dengan biaya layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Melalui pelaporan akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi dan perubahan keuangan pemerintah, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kapasitas keuangannya, dan dengan demikian mengukur kapasitas aktual pemerintah. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual diarahkan untuk memberi manfaat lebih baik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), para pengguna, maupun pemeriksa keuangan pemerintah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Akuntansi berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi peluang untuk menggunakan sumber daya masa depan dan mencapai pengelolaan yang baik dari sumber daya tersebut.

Teori agensi dalam akuntansi pemerintah berkaitan dengan hubungan antara pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola keuangan pemerintah (agen) dengan pihak yang memiliki kepentingan (prinsipal).

Dalam hal ini, teori agensi berperan sebagai dasar bagi penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual. Sehingga tujuan akhir dari penerapan teori agensi dan standar akuntansi pemerintah basis akrual adalah untuk memastikan tercapainya pembangunan negara dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan pemerintah dengan melindungi kepentingan pihak yang memiliki kepentingan (prinsipal) dalam keuangan pemerintah.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putu Cita Ayu dan Ni Putu Ayu Kusumawati (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual,

kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dhea Putri Rahayu (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Ni Komang Ayu Mahartini, Anik Yuesti dan I Made Sudiartana (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sanusi Ariyanto (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Galih Supraja (2019) Maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

**H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Berpengaruh Positif Terhadap Pencatatan Laporan Keuangan.**

### **2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Proses pengendalian internal yang baik dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi organisasi akan menimbulkan semangat organisasi untuk terus melakukan upaya dalam menjaga kualitas laporan keuangan organisasi.

Keterkaitan antara teori agensi dengan sistem pengendalian internal pemerintah adalah bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dapat dianggap sebagai mekanisme pengendalian dan pemantauan agen di dalam suatu organisasi pemerintah. Sistem pengendalian internal ini membantu principal atau masyarakat untuk menilai tingkat kinerja dan akuntabilitas dari agen atau aparat pemerintah yang bekerja di dalamnya. Sehingga, keterkaitan teori agensi dengan sistem pengendalian internal pemerintah dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk mewujudkan *good governance* dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Dhea Putri Rahayu (2020) dengan penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi berbasis akkrual dan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Putu Cita Ayu dan Ni Putu Ayu Kusumawati (2020) dengan

penelitiannya yang menunjukkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi berbasis akrual, kompetensi sumber daya dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Tommy Ferdian (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Djoko Wibowo (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa analisis sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

**H2: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Pencatatan Laporan Keuangan.**

### **2.3.3 Pengaruh Kesiapan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sumber daya manusia adalah seseorang atau individu yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas. Kemampuan sumber daya manusia sangat berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan keuangan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang terkait langsung dengan sistem perlu memiliki keterampilan akuntansi yang memadai atau setidaknya kemauan untuk terus belajar dan meningkatkan keahlian di



bidang akuntansi. Kegagalan yang dialami sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan pengetahuan akuntansi akan berdampak pada laporan keuangan, seperti kesalahan dalam laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang diterapkan pemerintah sehingga mengakibatkan kualitas yang kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kapasitas sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber daya manusia dan teori agensi memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks manajemen organisasi, terutama dalam pengelolaan karyawan. Dimana pengelolaan sumber daya manusia menggunakan teori agensi melibatkan pembentukan kontrak antara manajemen dan karyawan dan sistem pengawasan kinerja. Sehingga pengelolaan sumber daya manusia dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi dengan memanfaatkan potensi karyawan yang ada.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh putu cita ayu dan ni putu ayu kusumawati (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Puji Hastutik dan Akhmad Ridwan (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan akuntansi akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Enita Binawati dan Eni

Dwi Susliyanti (2020) dalam penelitiannya bahwa pengaruh kualitas teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

**H3: Kesiapan Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Pencatatan Laporan Keuangan.**

**2.3.4 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kesiapan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Ketiga faktor tersebut saling terkait dan berkontribusi pada meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah. Penggunaan standar akuntansi pemerintah basis akrual membantu menyajikan informasi keuangan yang lebih akurat dan relevan, sistem pengendalian intern pemerintah yang baik melindungi integritas data keuangan, dan kesiapan sumber daya manusia yang memadai memastikan bahwa proses akuntansi dilakukan dengan baik dan sesuai standar yang berlaku. Semua ini bersama-sama meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Pada penelitian dhea putri rahayu (2020), putu cita ayu dan ni putu ayu kusumawati (2020), Enita Binawati dan eni dwi susliyanti (2020), Djoko Wibowo (2020), Puji Hastutik dan Akhmad Ridwan (2018), Tommy Ferdian (2021), Ni Komang Ayu Mahartini, Anik Yuesti, dan I Made

Sudiartana (2021) dan Sanusi Ariyanto (2020) secara simultan hasil menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan kesiapan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan, artinya apabila instansi pemerintah memiliki penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan kesiapan sumber daya manusia yang tinggi maka kualitas laporan keuangan yang disusun tersebut sangat baik dan juga sebaliknya, mengacu dari paparan tersebut maka dijabarkan hipotesis sebagai berikut:

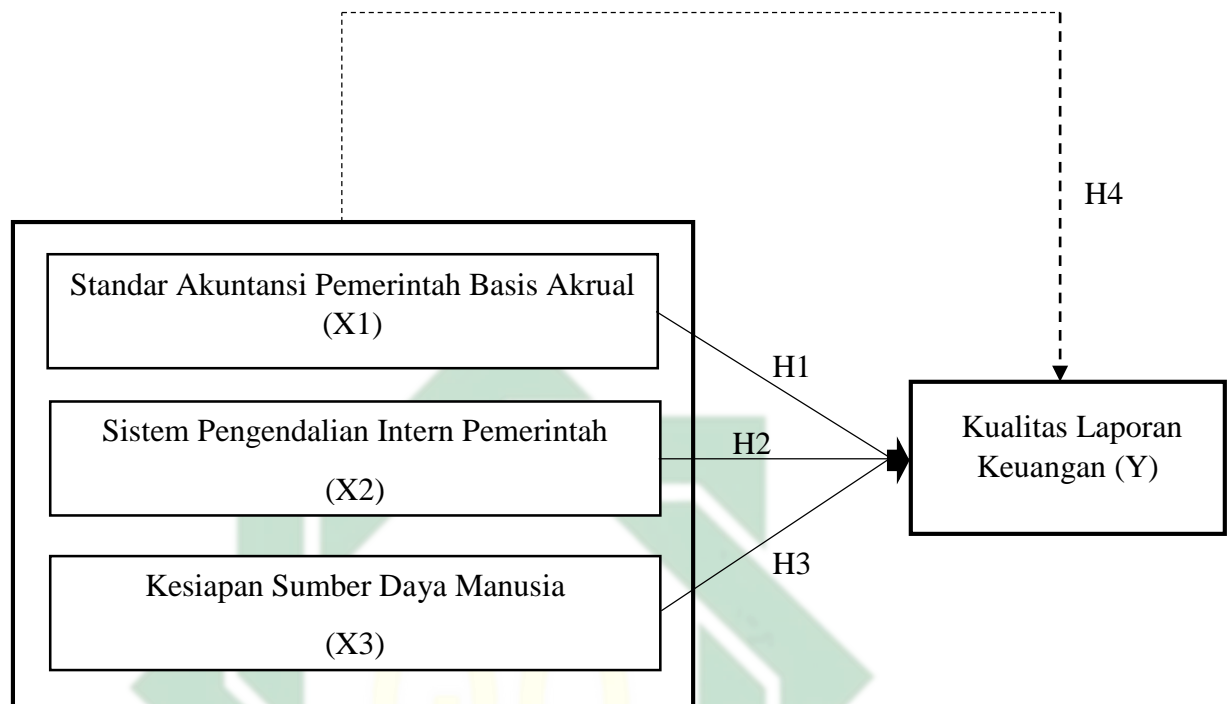
**H4: Secara Simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal Dan Kesiapan Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Pencatatan Laporan Keuangan**

#### **2.4 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual menurut (Sugiyono, 2014) adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel independen dengan variabel *dependen* yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini menguji pengaruh standar akuntansi pemerintah basis akrual (X1), sistem pengendalian internal pemerintah (X2) dan kesiapan sumber daya manusia (X3) terhadap kualitas pencatatan laporan keuangan (Y).

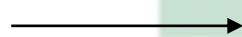
Berdasarkan teori dan rumusan masalah penelitian, maka kerangka konseptual yang digunakan dapat digambar pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**

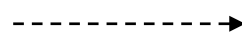


Sumber: Data yang diolah

Keterangan:



: Pengaruh secara parsial



: Pengaruh secara simultan

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, menurut sugiyono (2020) metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode positivistik karena berdasarkan pada filsafat positivism (Sugiyono, 2020). Metode ini sebagai metode ilmiah/ *scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit/ empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini dinamakan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif Statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di pemerintahan kabupaten Gresik, Jl. Dr. Wahiddin Sudirohusodo No. 245, kode pos: 61121 Gresik.

#### **3.3 Populasi Dan Sampel**

##### **3.3.1 Populasi**

Menurut sugiyono (2020) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020). Dengan kata lain, populasi terdiri dari benda-benda alam lainnya, bukan hanya manusia. Populasi tidak hanya mencakup jumlah objek/ subjek yang diselidiki, tetapi juga semua karakteristik/ sifat dari objek/ subjek tersebut. Semua dinas di pemerintahan kabupaten gresik ditetapkan menjadi populasi penelitian ini dengan jumlah 27 dinas, dengan rincian pada tabel 3.1 dibawah ini:

**Tabel 3. 1 Populasi Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Bidang</b>	<b>Jumlah</b>
1	Dinas Pendidikan	3
2	Dinas Kesehatan	3
3	Dinas pertanian	2
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	4
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3
6	Dinas Pemadam Kebakaran	2
7	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2
9	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	2
10	Dinas Perhubungan	3
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2
13	Dinas Komunikasi dan Informasi	3
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
15	Dinas Lingkungan Hidup	1
16	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4
17	Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman	3
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4
19	DISKOPERINDAG	7
20	Dinas Tenaga Kerja	2
21	Dinas Perikanan	3
22	Dinas Sosial	2
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
24	Satuan Polisis Pamong Praja (Satpol PP)	2
25	Badan Kesatuan Bangsa Politik	1

No.	Bidang	Jumlah
	<b>Total</b>	<b>89 Pegawai Bagian Keuangan</b>

Sumber: <http://data.gresikkab.go.id/id/dataset/pegawai-menurut-jabatan>

### 3.3.2 Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah anggota dari sifat-sifat dan jumlah yang ada pada populasi. Dengan besarnya populasi, peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi, oleh karenanya sampel diambil dari populasi tersebut. Sementara itu sebanyak 89 pegawai ditetapkan menjadi sampel penelitian. Menurut sugiyono (2020) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2020)

Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability* dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2020) mengatakan bahwa teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020). Sedangkan pencatatan laporan keuangan merupakan suatu pencatatan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maka dari itu, sampel diambil dari pegawai yang mengerjakan dan yang bertanggungjawab terhadap laporan keuangan. kriteria dalam pengambilan sampel yaitu; kasubag keuangan, kasubag belanja daerah, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pengelola keuangan, analisis keuangan pusat dan daerah ahli muda, analisis akuntabilitas kinerja aparatur, verifikator keuangan, pengadministrasian

keuangan, pengelola gaji, pengelola data keuangan daerah, analisi perbendaharaan dan staf yang berada dalam naungan Organisasi Perangkat daerah (OPD). Dilihat dari metode diatas, maka peneliti mengambil sampel pegawai dari bagian keuangan di 25 dinas yang melakukan penyusunan laporan keuangan. Adapun tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Sampel Penelitian**

<b>Sampel</b>	<b>Jumlah</b>
Kasubag Keuangan	9
Kasubag Belanja Daerah	1
Bendahara Pengeluaran	10
Bendahara Penerimaan	7
Pengelola Keuangan	3
Penyusun Laporan Keuangan	7
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1
Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	1
Verifikator Keuangan	9
Pengadministrasian Keuangan	4
Pengelola Gaji	1
Pengelola Data Keuangan Daerah	2
Analisis Perbendaharaan	1
Staf	33
<b>Total</b>	<b>89</b>

### 3.4 Variabel Penelitian

Menurut sugiyono (2020) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kata “variabel” hanya ada pada penelitian kuantitatif, karena penelitian kuantitatif berpandangan bahwa suatu gejala dapat diklasifikasikan menjadi variabel-variabel (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang digunakan ada 2 jenis variabel, yaitu variabel independen dan



variabel dependen. Dilihat dari bab landasan teori dan perumusan hipotesis diatas antara lain:

### **3.4.1 Variabel *Independent***

Variabel *independent* sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Menurut sugiyono (2020) variabel *independent* sering disebut sebagai variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependent* atau variabel terikat (Sugiyono, 2020). Variabel *independent* dari penelitian ini adalah:

#### **3.4.1.1 Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua**

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010, terkait SAP pada pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 bahwa Standar Akuntansi Pemerintah atau disebut SAP, yaitu suatu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam membuat dan melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan laporan keuangan pemerintah Indonesia.

#### **3.4.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

### **3.4.1.3 Sumber Daya Manusia**

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

### **3.4.2 Variabel Dependent**

Variabel dependent sering disebut variabel *output*, kriteria, konsekuen. Menurut Sugiyono (2020) variabel dependent atau variabel terkait adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2020). Variabel terkait atau variabel *dependent* dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Di mana laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan kinerja perusahaan pada periode tertentu.

### **3.5 Definisi Operasional**

Menurut Sugiyono (2020), pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel yang digunakan untuk mengukur dapat dilihat pada Tabel 3.3

berikut:

**Tabel 3. 3 Definisi Operasional**

<b>Variable Penelitian</b>	<b>Definisi Varibel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sumber</b>
<b>Variable Independent</b>			
Standar Akuntansi Pemerintah Basis AkruaI (X1)	Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Realisasi Anggaran</li> <li>2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran</li> <li>3. Laporan Posisi Keuangan</li> <li>4. Laporan Arus Kas</li> <li>5. Laporan Perubahan Ekuitas</li> <li>6. Laporan Operasional</li> <li>7. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan</li> </ol>	Dhea Putri Rahayu, 2020
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan Pengendalian (<i>Environment Control</i>)</li> <li>2. Penilaian Risiko (<i>Assessment Risk</i>)</li> <li>3. Aktivitas Pengendalian (<i>Activity Control</i>)</li> <li>4. Informasi dan Komunikasi (<i>Information and Communication</i>)</li> <li>5. Pemantauan (<i>Monitoring</i>)</li> </ol>	Djoko Wibowo, 2020
Kesiapan Sumber Daya Manusia (X3)	Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)</li> <li>2. Keterampilan (<i>skill</i>)</li> <li>3. Sikap atau Peilaku (<i>Attitude</i>)</li> </ol>	Djoko Wibowo, 2020

Variable Penelitian	Definisi Variabel	Indikator	Sumber
	keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.	4. Latar Belakang Pendidikan 5. Karakteristik Pribadi	
<b>Variabel dependent</b>			
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pemimpin perusahaan atas pengolahan perusahaan yang dipercaya kepadanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap perusahaan, yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditor (bank atau lembaga keuangan), maupun pihak yang berkepentingan lainnya.	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat Dibandingkan 4. Dapat dipahami	Tommy Ferdian, 2021

### 3.6 Jenis Dan Sumber Data

Peneliti menggunakan skala *Likert* sebagai pengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2020). Dalam skala *likert* ini menggunakan interval 1 hingga interval 4. Dengan kata lain, dari “Sangat Setuju” hingga “Sangat Tidak Setuju”.

Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, serta ini adalah sumber data dimana perolehannya melalui subjek survei atau responden dengan penyebaran kuisioner dan data sekunder dari web resmi kabupaten Gresik.

**Tabel 3. 4 Skala Likert**

No	Pertanyaan	Jawaban

		SS	ST	TS	STS
1	.....				

Keterangan:

SS = Sangat Setuju diberi skor 4

ST = Setuju diberi skor 3

TS = Tidak Setuju diberi skor 2

STS = Sangat Tidak Setuju diberi skor 1

### 3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Pengertian kuesioner menurut sugiyono (2020) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2020). Cara penelitian dengan menyebarkan kuesioner yaitu mensurvei langsung calon responden yang sudah ditetapkan apabila responden tersebut sudah sesuai dengan persyaratan, kemudian menanyakan calon responden untuk kesediaan mengisi kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Dirasa penting untuk melakukan prosedur ini karena peneliti harus memastikan agar kuesioner tersebut sudah dijawab responden untuk memenuhi syarat peosedurnya.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Pengertian dari teknik analisis data adalah tindakan yang harus dilakukan peneliti setelah terkumpulnya semua data dari responden. Tindakan

analisis data yang harus dilakukan adalah teknik untuk memilah data yang sesuai menggunakan jenis responden dan variabel, menstabilisasikan data sesuai variable dari semua responden, melakukan penyajian data, konstruk yang disurvei, kemudian menghitungnya agar mengerti jawaban rumusan masalahnya, dan menghitungnya lagi guna menguji hipotesis penelitian (Sugiyono, 2020).

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan computer atau laptop dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Program for Social Sciens*) 27 dengan tujuan mendapatkan hasil perhitungan yang akurat dan mempermudah dalam melakukan pengolahan data sehingga lebih cepat dan tepat.

### **3.8.1 Uji Kualitas Data**

Kualitas tanggapan responden saat menanggapi survei sangat penting karena itu menentukan kualitas data yang dikumpulkan. Responden yang mengisi kuisisioner ini sangat dipengaruhi oleh kualitas alat ukur faktor situasional yang digunakan oleh peneliti dan dalam melakukan penelitian belajar. Jika alat ukur yang digunakan peneliti tidak valid, maka hasil penelitian tidak mencerminkan situasi sebenarnya. Oleh karena itu, ukuran variabel peneliti gunakan angket atau kuisisioner untuk mengukur alat, uji validitas dan uji reliabilitas.

#### **3.8.1.1 Uji Validitas**

Pengertian validitas menurut sugiyono (2020) adalah derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan

data yang dikumpulkan oleh peneliti. Untuk tepat dalam mengukur yaitu diuji dengan menggunakan uji validitas data gunakan kualitas data dan hubungkan skor untuk setiap item ditentukan dalam uji validitas. Kriteria item yang ditentukan dalam dalam pengukuran data valid atau tidak, jika  $r$  hitung melebihi  $r$  tabel maka hasil valid. Untuk nilai  $\text{sig} < 0,05$  instrumen kualitas data disebut valid. Untuk mencari validitas sebuah item maka kolom yang dilihat yaitu kolom *corrected item-total correlation* pada tabel *item-total statistic* hasil pengolahan data dengan menggunakan *Statistic Program For Sosial Science* (SPSS), kriteria penilaian uji validitas adalah sebagai berikut:

- Apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka item kuisioner tersebut valid
- Apabila  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka item kuisioner tersebut tidak valid.

### 3.8.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut sugiyono (2020) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Suatu data kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas pengukuran dapat menggunakan metode *Cronbach Alpha*, setiap item diukur menggunakan aplikasi SPSS.

Kualitas data handal jika data memiliki *Alpha* positif dan lebih dari 0,6. Semakin besar nilainya, maka semakin efektif deklarasinya alat ukur (yang andal) yang digunakan. Reliabilitas diukur dengan koefisien *alpha cronbach's* dan dikatakan reliabel atau handal apabila nilai koefisien *alpha cronbach's*  $> 0,6$ . Sebaliknya, apabila nilai koefisien *alpha cronbach's*  $< 0,6$ , maka reliabilitas rendah. Selain itu juga, dapat membandingkan nilai *alpha cronbach's* dengan *r* tabel.

### 3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk melihat apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan pengujian uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

#### 3.8.2.1 Uji Normalitas

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan (Sugiyono, 2020). Menurut Sugiyono, uji normalitas digunakan untuk menguji variabel yang diteliti apakah data tersebut distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov*



*Test* dengan tingkat signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai sig > 0,05 maka dikatakan berdistribusi normal.
- Jika nilai sig < 0,05 maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

### 3.8.2.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam model yang digunakan (Ghozali, 2021). Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas tersebut, maka salah satu diantaranya dieliminir (dikeluarkan) dari model berganda atau menambah variabel bebasnya. Korelasi antara variabel independen dapat dideteksi dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dengan kriteria:

- Jika angka tolerance diatas 0,1 dan  $VIF < 10$ , maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas.
- Jika angka tolerance dibawah 0,1 dan  $VIF > 10$ , maka dikatakan terdapat gejala multikolinieritas.

### 3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2021). Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji Glejser. Uji Glejser menyusun untuk meregres nilai absolut residual terhadap variable independen. Pengujian ini membandingkan signifikansi dari uji tersebut terhadap  $\alpha$  sebesar 5%. Apabila signifikansi lebih dari 5% berarti tidak mengandung heteroskedastisitas. Dengan persamaan:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

### 3.8.3 Pengujian Hipotesis

#### 3.8.3.1 Analisis Regredi Linier Berganda

Teknik analisis regresi berganda merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan analisis regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut (Ghozali, 2021):

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = kualitas lapora keuangan

$\alpha$  = konstanta

b = Koefisien

X1 = penerapan SAP berbasis akrual

X2 = sistem pengendalian internal

X3 = kesiapan SDM

e = error term

### 3.8.3.2 Uji Statistik T (Uji Parsial)

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021). Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan. Hasil pengujian terhadap t-statistik adalah:

- Jika  $\text{sig} < \alpha$ ,  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  dan koefisien  $\beta$  positif, maka hipotesis diterima.
- Jika  $\text{sig} < \alpha$ ,  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  dan koefisien  $\beta$  negative, maka hipotesis ditolak.
- Jika  $\text{sig} > \alpha$ ,  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ , maka hipotesis ditolak.

### 3.8.3.3 Uji Statistik F (Uji Kelayakan Model)

Uji F-statistic pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Setelah F garis regresi ditemukan hasilnya, kemudian dibandingkan dengan F-tabel, tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar  $\alpha = 5\%$  dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*)  $df = (nk)$  dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel termasuk intersep. Jika  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ , maka ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama. Sebaliknya jika  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ , maka ini berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali, 2021)

### 3.8.3.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Ghozali (2020) menyatakan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui data variabel bebas terhadap variabel terikat dari adjusted R square nya. Pemilihan nilai adjusted R square karena penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan jumlah variabel lebih dari satu. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Menurut Gujarati (2003) jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted  $R^2$  negative, maka nilai adjusted  $R^2$  dianggap bernilai nol. Secara sistematis jika nilai  $R^2 = 1$ , maka adjusted  $R^2 = 1$ . Sedangkan jika nilai  $R^2 = 0$ , maka  $R^2 = (1 - k) / (n - k)$ . Jika  $k > 1$ , maka adjusted  $R^2$  akan bernilai negatif.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1 Lokasi Objek Penelitian

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengaruh standar akuntansi pemerintah basis akrual, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kesiapan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Populasi penelitian ini adalah 25 Organisasi perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Gresik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer berupa kuesioner dan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diambil dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Gresik.

OPD memiliki beberapa departemen, namun tidak semua departemen dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini, sehingga digunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan sampel penelitian. Metode *purposive sampling* yang digunakan adalah target sampling yang didasarkan pada aspek-aspek tertentu dan disesuaikan dengan tujuan penelitian sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai hasil yang representatif.

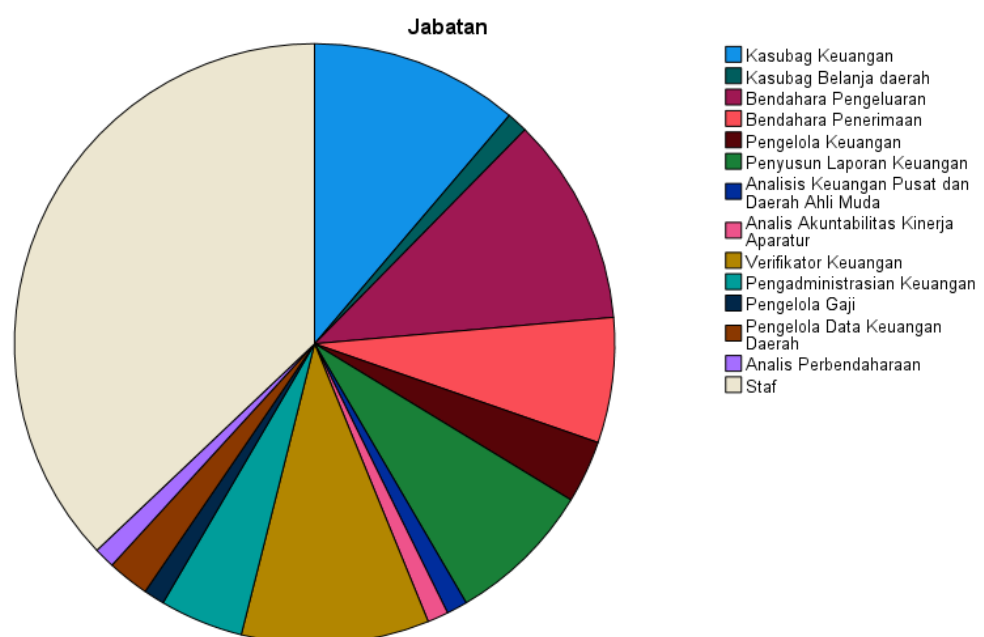
##### 4.1.2 Karakteristik Statistik Deskriptif Responden

Peneliti menggunakan karakteristik responden untuk memberikan informasi tentang data demografi responden (jabatan dan jenis kelamin). Sedangkan deskripsi variabel peneliti untuk mendukung hasil analisis data yang

menyajikan distribusi hasil jawaban responden atas pernyataan-pernyataan yang ada dalam angket. Adapun reaponsen dalam penelitian yaitu pegawai bagian keuangan pada 25 OPD di Pemerintah Kabupaten Gresik. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 89 pegawai.

#### 4.1.2.1 Berdasarkan Jabatan

**Gambar 4. 1 Data Berdasarkan Jabatan**

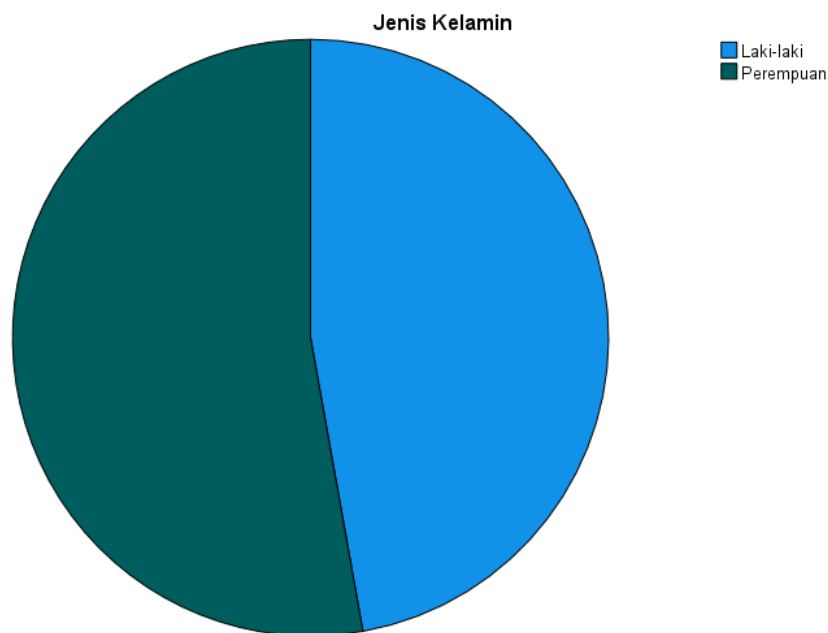


Kesimpulan dari gambar 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah responden kasubag keuangan sebanyak 10 responden dengan nilai presentase 11,2%., kasubag belanja daerah sebanyak 1 responden dengan nilai presentase 1,1%, bendahara pengeluaran sebanyak 10 responden dengan nilai presentase 11,2%, bendahara penerimaan sebanyak 6 responden dengan nilai presentase 6,7%, pengelola keuangan sebanyak 3 responden dengan nilai presentase 3,4%, penyusun laporan keuangan sebanyak 7 responden dengan nilai presentase 7,9%, analisis keuangan pusat dan daerah ahli muda sebanyak 1 responden dengan

nilai presentase 1,1%, analis akuntabilitas kinerja aparatur sebanyak 1 responden dengan nilai presentase 1,1%, verifikator keuangan sebanyak 9 reponsen dengan nilai presentase 10,1%, pengadministrasian keuangan sebanyak 4 responden dengan nilai presentase 4,5%, pengelola gadi sebanyak 1 responden dengan nilai presentase 1,1%, pengelola data keuangan daerah sebanyak 2 responden dengan nilai presentase 2,2%, analis perbendaharaan sebanyak 1 responden dengan nilai presentase 1,1%, dan untuk jumlah staf sebanyak 33 responden dengan nilai presentase 37,1%.

#### 4.1.2.2 Berdasarkan Jenis Kelamin

**Gambar 4. 2 Data Berdasarkan Jenis Kelamin**



Kesimpulan dari gambar 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 42 responden dengan nilai presentase 47,2%. Untuk responden perempuan berjumlah 47 dengan nilai presentase 52,8%.

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode mengumpulkan, meringkas, dan menyajikan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan rata-rata, maksimum, minimum dan standar deviasi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 4.2.1.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian bertujuan untuk mendukung hasil analisis data, sedangkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintah basis akrual, sistem pengendalian intern pemerintah, kesiapan sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan. Berikut adalah hasil statistik deskriptif untuk masing-masing variabel:

**Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	89	30.00	36.00	32.6180	2.35249
X2	89	49.00	68.00	59.2360	5.45023
X3	89	39.00	52.00	43.9775	4.25595
Y	89	36.00	44.00	40.7079	2.85324
Valid N (listwise)	89				

Sumber: Data Olah SPSS Versi 27 2023

Kesimpulan dari tabel 4.1 adalah jumlah observasi (N) pada penelitian ini adalah 89 sampel. Nilai minimum variabel standar akuntansi pemerintah basis akrual (X1) adalah 30 dan nilai maksimum adalah 36



dengan rata-rata 32, sedangkan nilai standar deviasi variabel standar akuntansi pemerintah basis akrual (X1) sebesar 2,35249.

## 4.2.2 Uji Kualitas Data

### 4.2.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dapat dikatakan valid jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dan bernilai positif (Sugiyono, 2020). Perhitungan uji validitas penelitian ini dengan SPSS 27 dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Rekap Hasil Uji Validitas**

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
<b>Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual (X1)</b>			
X1.1	0,756	0,206	Valid
X1.2	0,745	0,206	Valid
X1.3	0,622	0,206	Valid
X1.4	0,730	0,206	Valid
X1.5	0,753	0,206	Valid
X1.6	0,589	0,206	Valid
X1.7	0,801	0,206	Valid
X1.8	0,816	0,206	Valid
X1.9	0,745	0,206	Valid
<b>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)</b>			
X2.1	0,699	0,206	Valid
X2.2	0,591	0,206	Valid
X2.3	0,657	0,206	Valid
X2.4	0,698	0,206	Valid
X2.5	0,766	0,206	Valid
X2.6	0,668	0,206	Valid
X2.7	0,614	0,206	Valid
X2.8	0,549	0,206	Valid
X2.9	0,490	0,206	Valid

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.10	0,633	0,206	Valid
X2.11	0,530	0,206	Valid
X2.12	0,650	0,206	Valid
X2.13	0,685	0,206	Valid
X2.14	0,656	0,206	Valid
X2.15	0,697	0,206	Valid
X2.16	0,653	0,206	Valid
X2.17	0,634	0,206	Valid
<b>Kesiapan Sumber Daya Manusia (X3)</b>			
X3.1	0,610	0,206	Valid
X3.2	0,650	0,206	Valid
X3.3	0,618	0,206	Valid
X3.4	0,766	0,206	Valid
X3.5	0,721	0,206	Valid
X3.6	0,721	0,206	Valid
X3.7	0,768	0,206	Valid
X3.8	0,575	0,206	Valid
X3.9	0,655	0,206	Valid
X3.10	0,638	0,206	Valid
X3.11	0,718	0,206	Valid
X3.12	0,625	0,206	Valid
X3.13	0,466	0,206	Valid
<b>Kualitas Laporan Keuangan (Y)</b>			
Y1	0,854	0,206	Valid
Y2	0,876	0,206	Valid
Y3	0,843	0,206	Valid
Y4	0,801	0,206	Valid
Y5	0,742	0,206	Valid
Y6	0,870	0,206	Valid
Y7	0,786	0,206	Valid
Y8	0,829	0,206	Valid
Y9	0,805	0,206	Valid
Y10	0,753	0,206	Valid
Y11	0,660	0,206	Valid

Sumber: Data Olah SPSS Versi 27 2023

#### 4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Pengertian reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang menjadi indikator dari suatu variabel atau konstruk. Pertanyaan atau pernyataan dianggap andal jika jawaban seseorang atas pertanyaan atau pernyataan konsisten. Untuk mengukur reliabilitas item atau pernyataan kuesioner dengan cara menyebarkan kuesioner satu kali kepada responden. Kemudian, dengan menggunakan hasil skor, korelasi antara jawaban terhadap item pertanyaan yang sama atau item yang ditegaskan diukur dengan computer SPSS dengan fungsi *Cronbach Alpha (a)*. Instrument variabel dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Sugiyono, 2020). Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 3 Rekap Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah Basis AkruaI (X1)	0,890	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	0,909	Reliabel
Kesiapan Sumber Daya Manusia (X3)	0,886	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,946	Reliabel

Sumber: Data Olah SPSS Versi 27 2023

Berdasarkan tabel 4.3 nilai *Cronbach Alpha* setiap variabel diatas 0,60 yang berarti setiap variabel reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

### 4.2.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) dalam persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak normal (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, SPSS 27 digunakan dengan uji *one sample kolmogrof-smirnov Test*. Penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi normal jika memberikan nilai signifikan  $> 0,05$ , sedangkan dikatakan tidak normal jika menghasilkan nilai signifikan  $< 0,05$ . Dengan hasil tersebut, dapat dikatakan penelitian berdistribusi normal. Berikut hasil pengujian uji normalitas:

**Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual	
N		89	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.68308603	
Most Extreme Differences	Absolute	.082	
	Positive	.081	
	Negative	-.082	
Test Statistic		.082	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.189	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	.140	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.131
		Upper Bound	.149

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

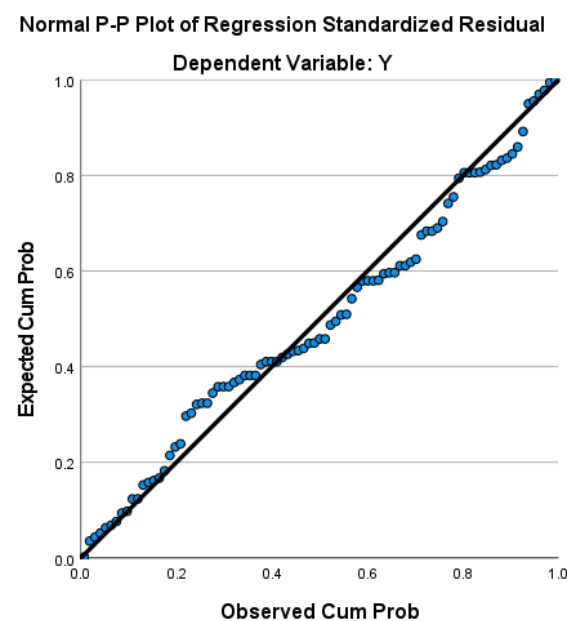
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Data Olah SPSS Versi 27 2023

Kesimpulan dari tabel 4.4 diketahui bahwa penelitian ini berdistribusi normal, hal itu dapat dilihat dari hasil uji normalitas di atas pada nilai asymp. Sig. (2-tailed) menunjukkan nilai  $0,189 > 0,05$ . Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian residual berdistribusi normal.

Uji normalitas juga ditentukan dengan menggunakan uji regresi standar “normal *PP Plot regression standardized residual*” dengan melihat sebaran data pada sumbu diagonal. Penyebaran dianggap normal ketika titik mengikuti garis diagonal. Berikut adalah hasil Plot penelitian ini:

**Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas**



Sumber: Data Olah SPSS Versi 27 2023

Berdasarkan gambar 4.3 diketahui bahwa plot normal PP dari residual standar berjalan mengitari garis diagonal dan mengikuti garis tersebut. Residual ini dapat dikatakan berdistribusi normal.

#### 4.2.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diterapkan pada analisis regresi berganda yang terdiri dari dua atau lebih variabel bebas atau variabel independen dimana keeratan hubungan antar variabel bebas diukur dengan besarnya koefisien korelasi. Untuk menguji multikolinieritas, peneliti menguji *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai toleransi. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1. Berikut hasil uji multikolinieritas:

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.406	2.565		3.666	<.001		
	X1	.566	.119	.467	4.759	<.001	.425	2.351
	X2	.168	.055	.321	3.071	.003	.376	2.661
	X3	.066	.061	.098	1.082	.282	.498	2.008

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olah SPSS Versi 27 2023

Berdasarkan hasil pada tabel 4.5 bahwa masing-masing variabel memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Pada variabel standar akuntansi pemerintah basis akrual memiliki nilai tolerance 0,425 > 0,1 dan nilai VIF 2,351 < 10, variabel sistem pengendalian intern pemerintah memiliki nilai tolerance 0,376 > 0,1 dan nilai VIF 2,661 < 10, variabel kesiapan sumber daya manusia memiliki nilai tolerance 0,498 > 0,1 dan nilai VIF 2,008 < 10. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak terjadi multikolinieritas.

#### 4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda juga perlu dilakukan pengujian apakah varian dari residual suatu pengamatan sama atau tidak.. Jika residualnya memiliki varian yang sama, maka dikatakan terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya. Untuk mengujinya peneliti menggunakan uji glejser, jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika memiliki nilai signifikan  $< 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas (Sugiyono, 2020). Berikut hasil uji heteroskedastisitas:

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.815	2.470		1.545	.126
	X1	.007	.064	.014	.117	.907
	X2	-.033	.026	-.169	-1.273	.207
	X3	-.027	.047	-.069	-.581	.563

a. Dependent Variable: absresid

Sumber: Data Olah SPSS Versi 27 2023

Berdasarkan tabel 4.6 interpretasinya uji heteroskedastisitas pada variabel standar akuntansi pemerintah basis akrual memiliki nilai signifikan  $0,907 > 0,05$ , variabel sistem pengendalian intern pemerintah memiliki nilai signifikan  $0,207 > 0,05$ , dan variabel kesiapan sumber daya manusia memiliki nilai signifikan  $0,563 > 0,05$ . Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas antara semua variabel independen.

## 4.2.4 Pengujian Hipotesis

### 4.2.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan analisis regresi adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

**Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	9.406	2.565		3.666	.000
	Standar Akuntansi Pemerintah Basis AkruaI	.566	.119	.467	4.759	.000
	sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.168	.055	.321	3.071	.003
	Kesiapan Sumber Daya Manusia	.066	.061	.098	1.082	.282

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data Olah SPSS Versi 27 2023

Berdasarkan tabel 4.7 persamaan linier dapat dirumuskan persamaan linier sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 9,406 + 0,566 X_1 + 0,168X_2 + 0,66X_3 + e$$

Pada persamaan linier tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai  $\alpha$  sebesar 9,406 merupakan konstanta atau kondisi ketika variabel kualitas laporan keuangan belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel standar akuntansi pemerintah basis akrual (X1), sistem



pengendalian intern pemerintah (X2), dan kesiapan sumber daya manusia (X3). Jika variabel independen tidak ada maka variabel kualitas laporan keuangan tidak mengalami perubahan

- b) Nilai koefisien regresi standar akuntansi pemerintah basis akrual sebesar 0,566 yang menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintah basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, artinya setiap satuab standar akuntansi pemerintah basis akrual meningkat, variabel kualitas laporan keuangan berpengaruh sebesar 0,566,
- c) Nilai koefisien regresi sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,168 yang menunjukkan bahwa variabel SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, artinya setiap kenaikan 1 satuan variabel SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 0,566
- d) Nilai koefisien regresi kesiapan sumber daya manusia sebesar 0,066 yang menunjukkan bahwa variabel kesiapan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel kesiapan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangam sebesar 0,066

#### 4.2.4.2 Uji Parsial (Uji T)

Tujuan dari uji T adalah untuk mengetahui apakah avariabel independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen atau tidak. Uji T menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen, yaitu standar akuntansi pemerintah basis akrual, sistem pengendalian intern

pemerintah dan kesiapan sumber daya manusia terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Untuk mengetahui hasil uji t dapat dilihat pada kolom signifikansi sebesar 5% atau 0,05 dan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Jika t hitung > t tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sedangkan jika t hitung < t tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Berikut adalah hasil uji t:

**Tabel 4. 8 Hasil Uji T (Parsial)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.406	2.565		3.666	<.001		
	X1	.566	.119	.467	4.759	<.001	.425	2.351
	X2	.168	.055	.321	3.071	.003	.376	2.661
	X3	.066	.061	.098	1.082	.282	.498	2.008

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olah SPSS Versi 27 2023

Analisis tabel 4.8 meliputi:

- a. Pengaruh standar akuntansi basis akrual (X1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y)

Dari hasil diatas diperoleh nilai t hitung variabel standar akuntansi pemerintah basis akrual sebesar 4,759 dimana t tabel sebesar 1,988 dan nilai signifikan < 0,001, maka kesimpulannya yaitu t hitung 4,759 > 1,988 dan nilai signifikan < 0,001 < 0,05 artinya  $H_a$  diterima yang berarti standar akuntansi pemerintah basis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

- b. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (X2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y)

Dari hasil diatas diperoleh nilai t hitung variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 3,071 dimana t tabel sebesar 1,988 dan nilai signifikan 0,003, maka kesimpulannya t hitung  $3,071 > 1,988$  dan nilai signifikan  $0,003 < 0,05$  artinya  $H_a$  diterima yang berarti sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

- c. Pengaruh kesiapan sumber daya manusia (X3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y)

Dari hasil diatas diperoleh nilai t hitung variabel kesiapan sumber daya manusia sebesar 1,082 dimana t tabel sebesar 1,988 dan nilai signifikan 0,282, maka kesimpulannya yaitu t hitung  $1,082 < 1,988$  dan nilai signifikan  $0,282 > 0,05$  artinya  $H_0$  diterima yang berarti kesiapan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

#### 4.2.4.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah diantara semua variabel bebas yaitu standar akuntansi pemerintah basis akrual (X1), sistem pengendalian intern pemerintah (X2), dan kesiapan sumber daya manusia (X3) berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

Untuk mengetahuinya, hasil uji F dapat dilihat pada tabel Annova dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  atau f hitung  $> f$  tabel, hasilnya akan mempengaruhi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan, sebaliknya apabila nilai signifikan  $> 0,05$  atau f hitung  $< f$  tabel maka hasilnya tidak berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Berikut hasil uji F:

**Tabel 4. 9 Hasil Uji F (Simultan)**

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	467.120	3	155.707	53.092	.000 <sup>b</sup>
Residual	249.285	85	2.933		
Total	716.404	88			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data Olah SPSS Versi 27 2023

Berdasarkan hasil analisis diatas f hitung sebesar 53,052 dengan f tabel 2,711 dan nilai signifikansi 0,000, maka nilai f hitung  $53,052 > 2,711$  dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Kesimpulannya bahwa hasil uji F secara simultan variabel standar akuntansi pemerintah basis akrual (X1), sistem pengendalian intern pemerintah (X2), dan kesiapan sumber daya Manusia (X3) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

#### 4.2.4.4 Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)

Tujuan dari uji koefisien determinan (R<sup>2</sup>) adalah untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

Berikut adalah hasil uji koefisien determinan atau R-square:

**Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinan**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.807 <sup>a</sup>	.652	.640	1.71253

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olah SPSS Versi 27 2023

Analisis tabel 4.10 menunjukkan bahwa koefisien determinan dari Adjusted R Square adalah 0, 652 atau 65,2% jika diplot. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintah basis akrual, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kesiapan sumber daya manusia berpengaruh sebesar 65,2% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya sebesar 34,8% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS versi 27, variabel standar akuntansi pemerintah basis akrual memiliki nilai lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yang berarti variabel standar akuntansi pemerintah basis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil pengolahan data penelitian ini mendukung H1 bahwa variabel standar akuntansi pemerintah basis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ini mendukung prediksi teori agensi terkait pemerintah bahwa pengawasan dari masyarakat diperlukan untuk mengurangi konflik keagenan antara pemerintah dan masyarakat, bentuk pengawasannya meliputi laporan keuangan yang berkualitas dan pengungkapan informasi kepada publik. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual. Penggunaan standar akuntansi

pemerintah basis akrual merupakan kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan pemerintah, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai implementasi politik harus melaksanakan peraturan pemerintah tersebut.

Sedangkan unsur laporan keuangan pemerintah basis akrual salah satunya terdiri dari laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan data laporan realisasi anggaran yang diperoleh dapat diketahui anggaran pendapatan senilai 3.291.997.122.262,00 dengan realisasi anggaran pendapatan senilai 3.133.574.194.041,41, anggaran belanja senilai 3.597.937.590.465,00 dengan realisasi anggaran belanja senilai 3.192.751.693.289,33, anggaran pembiayaan senilai 305.940.468.203,00 dengan realisasi anggaran pembiayaan senilai 305.955.960.203,27 pada Pemerintahan Kabupaten Gresik tahun 2021.

Laporan realisasi anggaran dapat dikatakan baik dengan melihat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Semakin besar SILPA yang diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran. Berdasarkan Laporan realisasi Anggaran, kinerja pemerintah kabupaten Gresik secara umum sudah baik terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti Pemerintah Kabupaten Gresik sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran dengan jumlah SILPA senilai 246.778.460.955,35.

Hasil ini mendukung penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Putu Cita Ayu dan Ni Putu Ayu Kusumawati (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Dhea Putri Rahayu (2020), Ni Komang Ayu Mahartini, Anik Yuesti dan I Made Sudiartana (2021), Sanusi Ariyanto (2020) yang mengungkapkan penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **4.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS versi 27 diperoleh nilai signifikansi variabel sistem pengendalian intern pemerintah lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yang berarti variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil pengolahan data penelitian ini mendukung H2 yang menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hal ini mendukung prediksi teori agensi yang dikaitkan dengan pemerintahan menyebutkan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan masyarakat. Untuk mengurangi agency cost akibat masalah keagenan tersebut maka diperlukan laporan keuangan dan pengungkapan

informasi. Sistem pengendalian intern pemerintah dapat membantu pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Selain itu hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan Dhea Putri Rahayu (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Putu Cita Ayu dan Ni Putu Ayu Kusumawati (2020), Tommy Ferdian (2021), Djoko Wibowo (2020) yang mengungkapkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **4.3.3 Pengaruh Kesiapan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil olah data SPSS versi 27 uji t menyimpulkan bahwa variabel kesiapan sumber daya manusia memiliki nilai signifikan t lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel yang berarti variabel kesiapan sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil olah data penelitian ini tidak mendukung H3 yang menyatakan bahwa variabel kesiapan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hal ini bertentangan dengan teori agensi dalam sektor pemerintah yang mengartikan bentuk tanggungjawab pemerintah sebagai penerima amanah atau agen terhadap pemberi amanah atau principal untuk memberikan, menyajikan informasi yang sesungguhnya. Menurut Hastutik dan Ridwan (2018) dalam menilai kompetensi SDM melalui inerja tugas, termasuk dalam hal penyusunan



dan penyajian laporan keuangan dapat dilihat dari pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap pegawai, pengalaman serta sikap dan tanggungjawab setiap pegawai terhadap tugas masing-masing. Pengetahuan dan kemampuan setiap pegawai dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan jurusan yang dimiliki pegawai di bagian pengelolaan keuangan di OPD Kabupaten Gresik.

Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sumber daya manusia pada bagian pengelolaan keuangan Pemerintah di Kabupaten Gresik belum mencukupi bahkan sebagian besar sumber daya manusia pada bagian pengelolaan keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Sebagaimana yang diketahui dalam pemerintahan untuk menduduki suatu posisi jabatan tidak harus berdasarkan latar belakang pendidikan dan kemampuan yang dimiliki. Pelaksanaan tugas hanya berdasarkan jabatan yang sesuai dengan pangkat dan golongannya, tanpa mempertimbangkan keahlian dan latar belakang pendidikan, sehingga banyak pegawai di bidang keuangan yang belum memahami prinsip penyusunan laporan keuangan dalam teori akuntansi.. Namun dengan keterbatasan SDM di bidang keuangan bukan berarti laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Gresik tidak berkualitas, karena sebagian dari proses penyusunan laporan keuangan telah didukung dengan sistem aplikasi yang telah dirancang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gresik selalu dilakukan pendampingan oleh pihak BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Inspektorat demi terciptanya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktriana Arza, Yulia Safitri, dan Delori Nancy Meyla dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu Cita Ayu dan Ni Putu Ayu Kusumawati (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga tidak didukung oleh Puji Hastutik dan Akhmad Ridwan (2018), Enita Binawati dan Eni Dwi Susliyanti (2020), Sanusi Ariyanto (2020), dan Ternalemta, Lintje Kalangi, Jantje J. Tinangon (2021) yang menyatakan bahwa kesiapan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **4.3.4 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kesiapan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS versi 27 ditemukan bahwa variabel standar akuntansi pemerintah basis akrual, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kesiapan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F (simultan) yang menunjukkan nilai f lebih besar dari nilai f tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Hasil ini mendukung H4 yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah basis akrual, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kesiapan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil SPSS pada tabel Modal Summary menunjukkan bahwa koefisien determinan (R-Square) sebesar 0,652 menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kesiapan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 65,2% dan 34,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pada penelitian putu cita ayu dan ni putu ayu kusumawati (2020), Oktriana Arza, Yulia Syafitri, Delori Nancy Meyla (2021), dan Ternalemta, Lintje Kalangi, Jantje J. Tinangon (2021) secara simultan hasil menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian intern pemerintah dan kesiapan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh simultan, artinya apabila instansi pemerintah memiliki penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan kesiapan sumber daya manusia yang tinggi maka kualitas laporan keuangan yang disusun tersebut sangat baik dan juga sebaliknya apabila instansi pemerintah memiliki penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan kesiapan sumber daya manusia yang rendah maka kualitas laporan keuangan pemerintah yang disusun tidak baik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Standar akuntansi pemerintah basis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut mendukung prediksi teori agensi bahwa untuk mengurangi konflik keagenan antara pemerintah dan masyarakat diperlukan pengawasan dari masyarakat, bentuk pengawasannya adalah laporan keuangan yang berkualitas dan pengungkapan informasi kepada publik.
2. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut mendukung prediksi teori agensi bahwa pemerintah akan melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan masyarakat.
3. Kesiapan sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut tidak mendukung teori keagenan dalam sektor pemerintah yang memaknai akuntabilitas publik merupakan bentuk tanggungjawab penerima amanah atau agen terhadap pemberi amanah atau principal untuk memberikan, menyajikan informasi yang sesungguhnya.
4. Penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kesiapan sumber daya manusia berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan. artinya apabila instansi pemerintah memiliki penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis

akrual, sistem pengendalian internal dan kesiapan sumber daya manusia yang tinggi maka kualitas laporan keuangan yang disusun tersebut sangat baik.

## 5.2 Saran

1. Diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kinerja serta kualitas pelaporan keuangan pemerintah
2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan sampel yang lebih banyak serta memperluas objek penelitian yang tidak hanya di lingkup pemerintahan kabupaten Gresik
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen yang ada kaitannya dengan kualitas laporan keuangan. Mengingat pada hasil penelitian ini bahwa variabel kesiapan sumber daya manusia yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
4. Diharapkan dapat menggunakan alat analisis dan metode pengambilan sampel yang berbeda sehingga dapat mendapatkan hasil yang lebih mendalam

## 5.3 Keterbasan

1. Periode observasi penelitian ini hanya 1 bulan. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah periode pengamatan dengan menyesuaikan waktu yang dibutuhkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. *Jurnal Valuta*, 6(1).
- Arza, O., Syafitri, Y., & Meyla, D. N. (2021). PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA PADANGPANJANG. *Pareso Jurnal*, 3(3), 519–542.
- Ayu, P. C., & Kusumawati, N. P. A. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 113–126. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v2i1.555>
- Baridwan, Z. (2000). *Perkembangan Teori Dan Penelitian Akuntansi*. 15(4), 486–497.
- Binawati, E., & Susliyanti, E. D. (2020). Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Dimoderisasi Dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akruar Dan Sistem AKkuntansi Keuangan Pemerintah Studi pada Direktur. *OPTIMAL*, 17(2), 20–37.
- Dini Lestari dan Sri Rahayu. (2020). Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (Sap) Berbasis Akruar Dalam Pengambilan Keputusan Internal Dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 75–86. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2222>
- Fathia, N., Tanjung, A. R., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Dae. *Pekbis Jurnal*, 12(1), 39–54.
- Ferdian, T. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dusun Di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo). *Jurnal AKRAB JUARA*, 6(5), 35–48.
- Gasperz, J. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku). *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 5(2), 75–83. <https://doi.org/10.21070/jbmp.v5i2.2550>

- Ghozali, P. I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hastutik, P., & Riduwan, A. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Akuntansi Akruwal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(7).
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140.  
<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Iswahyudi, & Dwi Prastowo Darminto. (2019). Efektivitas Pengendalian Intern Piutang Usaha dengan Menggunakan Pendekatan COSO. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 6(02), 31–44. <https://doi.org/10.35838/jrap.v6i02.1042>
- Jaunanda, M., Giovani, N., Anton, R., & Susanto, T. R. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Siklus Persediaan Pada PT. Surya Toto Indonesia Tbk (Subsektor Fitting). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 40–49.  
<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>
- Mahartini, N. K. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. *Jurnal Karma*, 1(4), 1125–1134.
- Rahayu, D. P. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akruwal, Dan Sistem Pengendalian Intren Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .... *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(71), 87–96.  
<http://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma/article/view/683>
- Rumamby, W. P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2021). Evaluasi Implementasi Pengendalian Internal Berbasis Coso Pada PT. Moy Veronika. *Jurnal EMBA*, 9(2), 261–268.
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (2nd ed.). ALFABETA.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 10.  
<https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1256>
- Wibowo, D. (2020). Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapin). *17 Kindai*, 18(1), 16–29.
- Wurangian, M., Sondakh, J. J., & Manossoh, H. (2021). Pengaruh Kompetensi

Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 12(2), 264–275.

Yaqin, A., & Jatmiko, B. (2018). Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah : Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.18196/rab.020116>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A